



Pengelolaan Aset Daerah Masih Menjadi Catatan

BPK Serahkan Laporan Keuangan Seluruh Pemda di Jatim

SURABAYA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023. Hasilnya, pemprov maupun 38 pemkab/pemkot se-Jatim mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Meski demikian, bukan berarti LHP hampir semua pemerintah daerah tanpa cela. BPK masih mendapati sejumlah temuan terkait penggunaan maupun pelaporan. Tak hanya itu, lembaga itu juga memberi



TRADISIONAL: Pj Gubernur Adhy Karyono (kiri) bersama anggota V BPK Ahmadi Noor Supit di kantor BPK Perwakilan Jatim kemarin (2/5).

beberapa catatan.

"LKPD seluruh pemerintah daerah memang sudah memenuhi syarat penyusunan. Namun, masih ada temuan yang perlu ditindaklanjuti. Kesalahan yang berulang juga masih ada," kata Kepala Perwakilan BPK Jatim Karyadi se usai penyerahan LKPD di kantor

BPK di Surabaya kemarin.

Temuan dari petugas pemeriksa di setiap daerah berbeda-beda. Di antaranya, proyek APBD yang volumenya tidak sesuai rencana yang sudah ditetapkan.

Selain itu, ada pemerintah daerah yang mendapat sorotan karena penataan

asetnya tak tertib. Penyebabnya beragam. Mulai keberadaan aset yang tak terdata hingga temuan adanya aset pemda yang disalahgunakan pihak ketiga. Namun, ternyata pemda tidak mengetahui status aset tersebut.

Karyadi menyatakan bahwa rekomendasi sudah diberikan BPK. Harapannya, ada tindak lanjut dari masukan tersebut. "Kami berharap semua rekomendasi ditindaklanjuti," kata Karyadi.

Gubernur Jatim Adhy Karyono meminta seluruh kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi yang sudah diberikan BPK atas LHP itu. "Saya juga meminta temuan segera diselesaikan," kata Adhy. **(hen/c12/ris)**